

HARIAN BERNAS

Mengindonesia dengan Kearifan Lokal

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

Oleh: Anton Haryono

BANGSA Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Darpadanya masyarakat majemuk Nusantara mampu berintegrasi ke dalam bangunan negara republik kesatuan. Realitas ini tentu tidak hanya pantas tetapi harus disyukuri. Meskipun demikian, selama ini bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan-persoalan kebangsaan yang krusial. Amat paradoksal, di negeri berdasar Pancasila, berbagai bentuk diskriminasi terus terjadi. Rezim penguasa yang otoriter dan represif mudah tumbuh. Begitu pula, pelanggaran HAM. Ketika kesejahteraan yang hendak dituju masih jauh dari kata "tercapai" dan jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, korupsi merajalela.

Paradoks kehidupan makin mencabik-cabik nurani manakala disadari bahwa tindakan-tindakan politik kekuasaan yang senyatanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terjadi pada saat otoritas politik sedemikian gelot mengam-

panyekan pentingnya implementasi nilai-nilai dasar itu. Pernah otoritas politik memiliki tafsirnya sendiri, tafsir manipulatif, tafsir yang diabdikan untuk langgengnya kekuasaan non-demokratis. Pancasila mengalami proses politisasi dan menjadi alat indoktrinasi, sedemikian rupa kekuasaan makin menajuh dari kepentingan dan hak-hak rakyat.

Ketika Orde Baru tumbang, kehendak untuk menjalani proses demokratisasi muncul ke permukaan. UUD 1945

diamandemen, pasal-pasal yang dulu dapat ditafsirkan menurut kepentingan penguasa yang abai terhadap hak-hak rakyat diperbaiki. Sejumlah pasal baru yang dapat menopang bagi upaya demokratisasi diambangkan, termasuk di dalamnya pasal-pasal tentang HAM. Partai politik memperoleh kebebasan-nya kembali, tumbuh sedemikian subur.

Namun, dalam sejumlah kasus kehidupan politik kehilangan nilai-nilai etisnya. Politik kekerasan, baik

yang bersifat fisik maupun simbolik, tidak serta merta absen seiring dengan bergulirnya reformasi. Konflik kepentingan antar elit politik pun kemudian memproduksi konflik-konflik antar kelompok di masyarakat.

Pada saat kehendak menjalankan proses demokratisasi telah ditetapkan, pertimbangan tentang Pancasila justru mengalami masa "senyap". Seolah-olah proses demokratisasi dapat dilaksanakan tanpa harus mengindahkan Pancasila. Para pemangku kepentingan barangkali lupa bahwa Pancasila telah menjadi kesepakatan rakyat Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Keterlupaan ini, atau kesengajaan untuk melupakan, menyebabkan proses reformasi kehilangan arah. Maunya menuju tatanan demokratis dan menjerah terakan, tetapi tersesat di jalan sarat baku hantam politik kepentingan, kekerasan, dan sektarianisme. Gembat-gembor Pancasila dari rezim otoriter sehahekat dengan pelaksanaan Pancasila oleh orde politik transaksional, karena keduanya bertolak dari nafsu berkuasa belaka. ***

Dr. Anton Haryono MHum, Pengajar Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

